

FILSAFAT EKONOMI ISLAM: RASIONALITAS DAN RELIGIUSITAS EKONOMI

Bambang Wahyu

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstract:

This study is aimed to show the importance of epistemological study in Islamic economics fields. There are two approaches under Islamic economics: descriptive-analysis and thematic-analysis. Both have a relevancy in order to strenghten Islamic economics study. Based on epistemological approach there are two kinds of Islamic economics studies rely on its normative manner i.e. rationality of economics and religiosity of economic. And both can not be released from Islamic moral foundations.

Keywords: epistemologi, homo economicus, analisa-tematik, deskripsi-analisis, ilmu normatif, rasionalitas ekonomi, religiusitas ekonomi.

I. Pendahuluan

Secara epistemologis, filsafat ekonomi dalam Islam dapat didekati dari dua persoalan. *Pertama*, analisis-deskriptif terhadap pemikiran para tokoh ekonomi Islam. Pada konteks ini, filsafat ekonomi harus memiliki landasan pemikiran ekonomi dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom Islam baik klasik maupun modern. Pemikiran ini selain ditarik relevansi dengan situasi kekinian, juga dicari relevansi antar pemikiran sehingga yang satu memperkuat atau mengkritisi pemikiran yang lain. Misalnya pemikiran Al-Ghazali (1058-1111) tentang mekanisme pasar dicari relevansi konsepnya dengan situasi pasar sekarang. Proses ini secara metodologis menghasilkan idealitas sistem pasar dalam Islam dan berimplikasi pada konsep distribusi kesejahteraan. Dalam hal relevansi pemikiran satu tokoh dengan yang lain bertujuan memperkuat gagasan tentang satu konsep ekonomi Islam yang memiliki ketangguhan metodologi sehingga menjadi paradigma¹ ekonomi Islam. Misalnya konsep pengagungan status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi. Paradigma status manusia ini menghantam eksistensi manusia sebagai *homo economicus* sehingga kegiatan ekonomi tidak sekedar rutinitas manusia secara fisik dan psikis tapi juga melibatkan dimensi spiritual.

Dalam hal ini, Islam memiliki khazanah ilmu pengetahuan yang sangat kaya sebagai sumber metodologi ekonomi Islam. Mulai dari pengembangan sistem fiskal dan moneter pada masa Rasulullah dan Khulafar Rasyidin, model pembagian kerja (*division of labor*) as-Syaibani (132-189 H), teori anomali ekonomi Yahya bin Umar (213-289 H), hierarki produksi Al-Ghazali (450-505 H), hierarki kebutuhan manusia as-Syatibi (-790 H), teori harga Ibn Taimiyah (661-728 H), teori perdagangan internasional Ibn Khaldun (732-808 H), teori uang

¹ Paradigma sebagaimana diyakini Thomas Kuhn adalah sistem pemikiran (*mode of thought*) dan sistem penelitian (*mode of inquiry*). Perpaduan dua sistem ini melahirkan sistem ilmu pengetahuan (*mode of knowledge*) yang diakui dan diimplementasikan oleh satu komunitas ilmiah atau masyarakat pendukungnya. Lihat pembahasan paradigma Thomas Kuhn dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave (ed.). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge. Cambridge University Press. 1989 (first edition 1970).

al-Maqrizi (766-845 H), dan lain sebagainya. Khazanah pemikiran ini selain membantu upaya epistemologis untuk merumuskan teori dan sistem ekonomi juga bertujuan untuk memberikan horizon pemikiran yang luas untuk konseptualisasi dan pengembangan di era kontemporer.

Kedua, analisis terhadap tema atau analisis-tematik. Dalam persoalan kedua ini, tema-tema urgen ekonomi Islam ditempatkan sebagai sumber metodologis untuk membedah pelbagai persoalan ekonomi dalam kaitannya dengan manusia individu, masyarakat, institusi bisnis, negara, dan kebijakan strategis lainnya. Keunikan analisis-tematik terletak pada titik temu konseptual dari berbagai aliran pemikiran. Walaupun demikian, ada perbedaan dalam pendekatan dan latar belakang keilmuan dari tokoh sehingga muncul perbedaan asumsi dasar. Tapi hal itu akan memperkaya khazanah teori-teori ekonomi Islam. Dengan demikian berbagai tema, konsep, dan pandangan dasar tentang kegiatan ekonomi diakumulasi secara komprehensif untuk merekayasa sistem ekonomi Islam.

Kedua persoalan epistemologis ini sering dilupakan karena anggapan bahwa ilmu ekonomi seluruhnya praktis. Artinya ilmu ekonomi hanya dibutuhkan manusia untuk memecahkan persoalan hidup jasmani dalam rentang pendek (seperti tingkah laku manusia untuk memproduksi). Masalahnya adalah banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sehingga kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi menyentuh persoalan yang rumit seperti tingkat kesejahteraan dan keadilan². Apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, akselerasi produksi, penambahan penduduk dan angkatan kerja, alih teknologi, angka kemiskinan dan pengangguran, dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah, disadari atau tidak, ekonomi telah bersentuhan dengan dimensi filsafat karena untuk mengerti permasalahan-permasalahan di atas dibutuhkan pemahaman yang mendalam melalui berbagai teori dan metodologi serta kemampuan analitis yang mumpuni. Di samping itu, manusia sebagai subjek ekonomi tidak hanya berurusan dengan masalah bagaimana produksi dan distribusi dilaksanakan tapi juga dengan kenyataan bahwa muncul relasi timbal balik sesama mereka yang terlibat di dalamnya seperti penilaian moral (*moral judgement*), kualitas sumber daya manusia, atau tanggung jawab sosial pengusaha.

II. Ekonomi Islam: Sebuah Ilmu Normatif

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang normatif. Artinya ekonomi Islam berusaha mengarahkan apa yang seharusnya (*das sollen*) dilakukan manusia dalam kegiatan ekonomi³. Karena kelemahan dan kekurangannya seringkali manusia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya itu sehingga membutuhkan pedoman. Pedoman itu termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, normativitas ekonomi Islam bersumber pada wahyu dan suri tauladan Rasulullah SAW. Secara metodologis, al-Qur'an memberikan pedoman dan prinsip umum untuk kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan koridor kemanusiaannya⁴. Dalam kerangka normatif ini muncul serangkaian konsep seperti urgensi kerja, keseimbangan (*tawazzun*), profesionalitas (*itqan*), kerja sama (*ta'awwun*), larangan merusak kelestarian alam, dan lain sebagainya. Di samping itu, kerangka normatif ini juga bersifat universal yaitu dapat diberlakukan dalam semua konteks waktu dan zaman karena memiliki kesesuaian dengan hukum alam. Bukankah orang jujur akan disenangi orang! Walau tinggal di Bandung atau Tokyo, walaupun hidup tahun 1938

² Mikhael Dua. *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius. 2008: 9

³ Dalam filsafat ilmu dibedakan antara ilmu positif dengan ilmu normatif. Jika ilmu positif mempelajari apa dan bagaimana suatu persoalan terjadi serta apa dan bagaimana cara penyelesaiannya (*da sein*). Ilmu normatif memberikan pedoman bagi manusia untuk mengambil satu tindakan atau putusan yang seharusnya dilakukan (*das sollen*).

⁴ Mohamed Aslam Haneef "Can There Be an Economic Based on Religion? The Case of Islamic Economics" *post-autistic economics review*. Issue no. 34; 30 Octobre 2005; article 3, pp. 41-52.
<http://www.peacon.net/PAEReview/issue34/Garnett34.htm>. 19-02-2008

atau 2008. Bukankah manusia yang suka kerja keras akan dihormati orang? Tak peduli orang Yaman atau Sleman, tak peduli hidup zaman Rasulullah atau era postmodern.

Atas dasar itu, ekonomi Islam berupaya mempengaruhi kegiatan produksi melalui ketentuan dan norma Islam sebagai variabel independen yang tak terpisahkan. Variabel itu biasanya berbentuk prinsip-prinsip moral, aturan, dan sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak dan bertingkah laku serta mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan⁵. Misalnya larangan merusak kelestarian alam dalam surat Hud: 61 adalah perintah moral sebagai kategori imperatif karena berkenaan dengan salah satu tugas manusia sebagai hamba Allah. Begitu juga dengan perbedaan kapasitas dan kemampuan antar manusia satu dengan manusia lain sebagaimana terangkum dalam surat al-An'am: 165. Implikasi moral yang terkandung dalam ayat ini menyuruh manusia untuk saling membantu dan bekerja sama untuk memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari.

Larangan terhadap riba, tindakan spekulatif, dan perjudian dapat dilihat dalam konteks untuk mencegah manusia meng-eksploitasi kemampuan dan kepemilikan manusia lain, memperoleh keuntungan tanpa kerja keras (*unearned gain*), atau mengajarkan manusia bahwa dalam kehidupan selalu ada risiko yang harus dihadapi. Kepemilikan harta kekayaan mengandung implikasi sosial karena ada bagian dari masyarakat sehingga ada kewajiban berzakat. Bagi anggota masyarakat yang mempunyai harta ada kewajiban untuk mendistribusikannya dalam bentuk investasi sehingga tidak menjadi *idle asset*. Jika tidak maka harta itu akan berkurang karena kewajiban membayar zakat⁶. Untuk menjaga nilainya, investasi adalah solusi di samping membantu individu lain yang membutuhkan modal.

Satu hal yang menarik dari normativitas ekonomi Islam adalah keterkaitannya dengan realitas ilahiyah (sebagaimana juga ilmu pengetahuan Islam yang lain⁷). Secara epistemologis, Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan sistem nilai. Ajaran Islam menjadi kategori moral imperatif untuk mengendalikan perilaku ekonomi manusia⁸. Pandangan dunia Islam menyebutkan bahwa asal, cara, dan tujuan manusia mempunyai konsekuensi eskatologis yaitu bermula dari dan bermuara pada keimanan pada Allah SWT⁹. Dengan keterkaitan ini, kegiatan ekonomi tidak semata-mata akumulasi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya tapi juga manifestasi ibadah dan bentuk ketundukan manusia pada Sang Khalik. Kesejahteraan ekonomi bersifat holistik dan seimbang antara dimensi ruhani-jasmani, fisik material-metafisik spiritual, kepentingan individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan lain sebagainya. Dengan demikian keuntungannya ganda: kesejahteraan hidup (profit) dan pahala di sisi Allah (benefit). Tingkah laku ekonomi manusia dipengaruhi oleh keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan jika dijalankan secara benar akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal.

Normativitas ekonomi Islam pada akhirnya melahirkan dua paradigma yaitu rasionalitas ekonomi dan religiusitas ekonomi.

⁵ Celaan al-Qur'an terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat Mekkah Jahiliyah dalam surat at-Takatsur: 1-4; al-Humazah: 1-7; dan al-Isra: 100 membuktikan kuatnya keinginan agama Islam untuk merekayasa orde sosial yang adil berdasarkan prinsip moral Islam. Politeisme masyarakat Mekkah Jahiliyah telah menyebabkan eksploitasi, monopoli, perdagangan yang curang, dan hidup bermewah-mewahan. Menurut Fazlur Rahman, tugas yang diemban manusia adalah membentuk tata sosial yang berlandaskan moral. Fazlur Rahman. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. Anas Muhyidin. Bandung: Pustaka. 1996: 54-55

⁶ HM. Metwally. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. terj. Husein Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insana. 1995: 71

⁷ Lihat pembahasan Osman Bakar. *Tawhid and Science*. Kuala Lumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science/Nurin Enterprise. 1991 dan Afzalur Rahman. *Quranic Sciences*. London: The Muslim Schools Trust. 1981

⁸ Charles K. Wilber "Ethics in Economic Theory" *post-autistic economics review*. Issue no. 20; 3 June 2003; article 1. <http://www.peacon.net/PAERReview/issue20/Wilber20.htm>. 19/02/2008

⁹ Monzer Kahf. *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield In: Muslim Studies Association. 1979: 5

III. Rasionalitas Ekonomi

Berdasarkan rasionalitas ekonomi, ekonomi Islam adalah sebuah pendekatan untuk menginterpretasi dan memecahkan masalah ekonomi berdasarkan nilai, norma, hukum, dan institusi yang diderivasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁰. Dengan kata lain, realitas empiris ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari pewahyuan al-Qur'an. Misalnya kewajiban manusia untuk bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan kemampuannya¹¹ (QS at-Taubah:105; Yunus:61,67; Hud:121,123). Dengan bekerja, manusia mampu mengubah kejumudan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Konsep ini sangat empiris di mana manusia yang bekerja keraslah akhirnya yang mencapai kesejahteraan hidup. Uniknyanya tidak ada satu agama pun (selain Islam) yang membicarakan tentang pentingnya kerja dalam sistem ajarannya¹².

Rasionalitas ekonomi menyediakan instrumen untuk menjelaskan fenomena dan kegiatan ekonomi termasuk perilaku manusianya sebagai variabel *necessary condition*. Melalui rasionalitasnya, ekonomi Islam berjalan dalam koridor ilmu pengetahuan yang secara empiris bergelut dengan rutinitas manusia sehari-hari. Persoalan ekonomi seperti kelangkaan (*scarcity*) barang adalah persoalan empiris karena banyak manusia merasakannya. Ekonomi Islam secara rasional memberikan solusi berupa larangan monopoli, distribusi yang adil, berjalannya sistem pasar melalui utilitas barang bukan harga, menyeimbangkan sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*), dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, ekonomi Islam menggagas asumsi bahwa tingkat permintaan barang masyarakat akan meningkat jika tingkat pengeluaran produsen dalam bentuk *social return* juga meningkat. Dengan kata lain, semakin banyak dana zakat, sedekah, infak, atau dana CSR yang dikeluarkan pengusaha akan meningkatkan permintaan terhadap produknya. Jadi, *social return* mengakibatkan *multiplier-effect* bagi daya beli masyarakat. *Social return* akan merangsang daya beli kelompok masyarakat miskin berdasarkan permintaan. Adapun produsen merespons-nya dengan mengarahkan kegiatan produksinya pada sisi permintaan yang telah jelas melalui diversifikasi produk (baik untuk masyarakat kaya maupun masyarakat miskin). Kondisi ini memberikan kesempatan bagi produsen untuk mengembangkan sisi penawaran dengan inovasi produk dan memperluas segmentasi pasar.

Dalam ekonomi konvensional, sisi permintaan-penawaran bersifat saling melengkapi. Permasalahan yang dialami sisi permintaan biasanya ditanggulangi sisi penawaran, begitupun sebaliknya. Biasanya pada sisi permintaan, hubungan antara harga dengan jumlah permintaan bersifat negatif. Jika harga barang naik, jumlah permintaan terhadap barang itu akan menurun. Jika harga turun, permintaannya akan naik. Dengan kata lain,

¹⁰ Mohamed Aslam Haneef "Can There Be an Economic Based on Religion? The Case of Islamic Economics" *post-autistic economics review*. Issue no. 34; 30 Octobre 2005; article 3, pp. 41-52.
<http://www.peacon.net/PAEReview/issue34/Garnett34.htm>. 19-02-2008

¹¹ Dalam al-Qur'an, bekerja memiliki padanan kata dengan '*amal*' yang disebutkan lebih dari 360 ayat dengan berbagai derivasinya. Prinsip utama yang terkandung dalam kerja menurut perspektif Islam adalah penolakan atas perbedaan kelas dan status sosial serta menegaskan kerja sebagai kewajiban dan ibadah (*religious duty*) setiap orang di mana perolehannya tergantung dari usaha dan balasan dari Allah SWT (QS an-Najm: 39-41). Lihat pembahasan Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte.Ltd. 2007: 40 serta Mushtaq Ahmad. *Business Ethics in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan. 1999: 9-10.

¹² Dalam konteks ini, penelitian Max Weber tentang kaitan antara Etika Protestan dengan spirit akumulasi kapital dari masyarakat Jerman hanya bersifat deskriptif untuk melihat keterkaitan antara agama dan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian Robert N. Bellah tentang perilaku ekonomi masyarakat Jepang pada masa Shogun Tokugawa. Berdasarkan dua penelitian ini terlihat bahwa agama hanya memberi landasan kegiatan ekonomi tapi tidak mempengaruhi perilaku ekonomi penganutnya. Jepang maju karena politik *dumping* dan restorasi Meiji paska PD II bukan karena Shintoisme sebagaimana diyakini Bellah.

produktivitas tinggi untuk menghasilkan satu barang mengakibatkan turunnya harga. Sebaliknya kelangkaan menaikkan harga. Pada sisi penawaran, hubungan harga dan permintaan bersifat positif. Jika harga naik maka permintaan atas barang itu akan naik. Sebaliknya turunnya harga menyebabkan turunnya permintaan¹³. Solusi dari ekonomi konvensional adalah memperbesar sisi penawaran jika sisi permintaan negatif. Sedangkan ekonomi Islam menanggulangnya secara berbeda. Sisi permintaan yang negatif ditanggulangi dengan zakat, sedekah, infak, dan dana CSR. Sedangkan penanggulangan sisi penawaran yang negatif melalui diversifikasi produk sesuai dengan utilitas masing-masing kelompok masyarakat. Jadi, respons produsen terhadap permintaan masyarakat menghasilkan *effective demand* yaitu prioritas produksi berdasarkan utilitas barang.

Rasionalitas ekonomi, dengan demikian, berguna untuk menjelaskan secara ilmiah fenomena ekonomi dan cara menanggulangnya. Hal ini diperoleh dari eksplorasi berbagai teori dan pemikiran ekonomi Islam. Penjelasan atas permasalahan ekonomi dicari solusinya berdasarkan *frame of reference* ekonomi sendiri sehingga ekonomi Islam tampil sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berbasis metodologi, memiliki sistem dan paradigma, mampu dijelaskan secara rasional dan sistematis, serta dapat diujicoba secara empiris. Atas dasar itu, pengembangan ekonomi Islam dan perangkat sistemiknya dapat mengikuti alur ilmu pengetahuan modern yang berbasis pada studi empiris dan pengujian ilmiah. Besarnya animo negara Eropa dan Asia membuka *window* syariah dalam sektor keuangan global disebabkan kenyataan bahwa sistem keuangan Islam mempunyai basis metodologi dan ketika diujicoba secara empiris ternyata sangat menguntungkan karena orientasinya pada stabilitas nilai uang. Sangat tidak aneh tentunya, kalau Inggris mengikrarkan London sebagai pusat pasar keuangan (*hub*) syariah internasional.

Dalam konteks ini, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang urgensi pengembangan ekonomi Islam dalam berbagai ranah ekonomi. Misalnya orientasinya pada stabilitas keuangan dengan mengeliminir bunga, pro sektor produksi dan usaha kecil menengah melalui pemberdayaan fungsi intermediasi lembaga keuangan, upaya mengembangkan kemitraan usaha, menekan konsumsi yang berlebihan masyarakat, dan lain sebagainya. Ambil contoh dalam sektor perbankan syariah. Ekonomi Islam tidak bisa mengembangkan pangsa pasar hanya berdasarkan tingkat emosional masyarakat karena beragama Islam. Mekanisme perbankan syariah melampaui dimensi itu sehingga semua elemen masyarakat mengakui kinerja dan orientasinya pada stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, pertanyaan masyarakat tentang “pembiayaan bank syariah mahal” harus dijelaskan dalam kriteria dan adagium rasionalitas ekonomi¹⁴. Transparansi dalam menjelaskan mekanisme dan cara kerja bank syariah menjadi syarat utama untuk mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar sehingga masyarakat merasa “aman” menjadi nasabah.

IV. Religiusitas Ekonomi

Religiusitas ekonomi adalah proyeksi akidah, syariah, dan moral dalam kegiatan ekonomi. Ketiga dimensi itu menyatu dalam pandangan dunia (*world-view*) Islam¹⁵ yang mengatakan bahwa pemilik sumber daya ekonomi adalah Allah SWT (QS al-Baqarah: 284; al-Maidah: 17; al-Hadid: 7). Manusia hanya diberi amanat untuk mengelola, mengambil

¹³ Tentu saja ada faktor lain yang merekayasa konfigurasi permintaan dan penawaran ini seperti jika produsen yang tidak mendapatkan pembeli atas produknya maka ia menurunkan harga jual.

¹⁴ Misalnya dalam buku teks ekonomi Islam, imbal bagi hasil selalu ideal yaitu 40-60, 70-30, atau 50-50 tapi kenyataannya imbal bagi hasil selalu mengacu pada suku bunga BI (BI Rate) sehingga banyak masyarakat “terkejut” ketika menjadi nasabah bank syariah ternyata imbal bagi hasilnya kecil 9,5%, 12%, atau 8,5% untuk shahibul mal.

¹⁵ Masudul Alam Choudhury. *Studies in Islamic Social Sciences*. New York&London: St. Martin’s Press, Inc. and MacMillan Press Ltd. 1998: 27

manfaat, dan menjaga kelestariannya¹⁶. Dari pemanfaatan ini tercukupi kebutuhan hidupnya dan meningkat kesejahteraannya tapi mengandung kewajiban mendistribusikannya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, investasi karena dalam hartanya ada bagian orang lain (fakir miskin dan orang yang membutuhkan, baik yang meminta maupun tidak). Dengan demikian, kegiatan ekonomi merupakan bentuk ketundukan manusia pada Allah SWT dengan asumsi untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kesejahteraan total bagi umat manusia. Pandangan dunia Islam ini menentang anggapan perilaku ekonomi hanya sebatas reaksi alamiah manusia untuk bertahan hidup.

Jauh sebelum muncul adagium *good business good ethics*, Islam telah memberikan asumsi bahwa perilaku ekonomi harus dijalankan dalam kerangka *moral-driven* atau *value-driven*. Konteks normativitas ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari religiusitas ini di mana tidak ada pemisahan antara realitas ekonomi dengan perilaku moral individu dan masyarakat. Tidak ada pemisahan antara pemahaman masalah ekonomi dengan cara mengatasinya. Melalui kategori moral imperatif, kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) tidak hanya bertujuan mencukupi kebutuhan hidup dan kesejahteraan (*well-being*) tapi juga bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Religiusitas ekonomi mengatakan manusia adalah mahluk moral¹⁷. Toshihiko Isutzu menyebutkan bahwa diskursus moralitas dalam al-Qur'an bertujuan memberikan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku yang berimplikasi sosial karena menegaskan gambaran manusia sebagai mahluk religius¹⁸. Karakter religius ini berimbas pada perilaku ekonominya. Misalnya seorang pengusaha mengetahui bahwa keuntungan usahanya harus didistribusikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah karena pemahaman manusia hanya pemilik relatif dari sumber kekayaan itu. Pemberian zakat, infak, dan sedekah merupakan suruhan agama (moral) yang tidak dapat dielakkan. Secara individu, pemberian ini akan mengendalikan sifat tamak dan mementingkan diri sendiri. Secara kolektif, bentuk distribusi kesejahteraan sebagai kewajiban sosial dan sikap altruisme. Melalui konfigurasi moralitasnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, mampu membedakannya, serta menyadari konsekuensi dari pilihannya. Moralitas mengarahkan manusia pada tujuan tertentu dengan cara dan instrumen yang benar. Di samping itu, kaidah moral yang tertanam dalam diri manusia merupakan tantangan yang membuat hidupnya menjadi arena perjuangan moral untuk mempertahankan eksistensinya sebagai hamba Allah dan *khalifah*-Nya. Dengan demikian, Islam adalah kekuatan moral yang mengarahkan perilaku ekonomi manusia untuk mencapai keseimbangan dalam hidup, merekayasa tata masyarakat etis, serta menyediakan orientasi untuk selamat menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Dalam Islam, rangkaian kegiatan ekonomi diawali dengan moralitas sehingga tujuannya dapat dijalankan secara optimal. Tujuannya adalah a) memahami perilaku dan permasalahan ekonomi, b) mengarahkan perilaku manusia untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Yang pertama memberikan pengertian dasar tentang realitas ekonomi dan aspek permasalahan yang muncul darinya. Sedangkan yang kedua memberikan pedoman tentang tata cara melaksanakan kegiatan ekonomi dan solusi untuk mengatasi

¹⁶ Tak kurang dari 750 ayat dalam al-Qur'an berkenaan dengan alam dan fenomenanya dengan tujuan memerintahkan manusia memahami proses penciptaan dan memanfaatkannya. Rujukan ini bertujuan untuk menarik perhatian manusia kepada Allah SWT sebagai pencipta dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, menggali, serta merenungkan wujud dan fenomena alam sebagai sarana atau media mendekatkan diri pada Sang Khalik (QS ar-Ruum: 22-28). Dengan demikian, memahami alam dapat mengembangkan wawasan manusia tentang penciptanya sekaligus mengembangkan cara untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi itu.

¹⁷ Moral berasal dari bahasa Latin *mores* (bentuk jamak: *mos*) yang bermakna adat dan kebiasaan. Perbedaan antara moral dan etika terletak pada jika etika digunakan untuk mengukur nilai perbuatan manusia berdasarkan rasio, moral menggunakan parameter norma di masyarakat. Moral digunakan untuk memberi batasan atas perbuatan manusia melalui standar nilai baik-buruk, benar-salah. *The American Heritage Concise Dictionary*. 3rd Edition. Houghton Mifflin Company. 1994.

¹⁸ Pengertian moral dalam al-Qur'an memiliki dua kategori, yaitu a) konsep kehidupan etis masyarakat muslim, b) konsep kehidupan beragama secara universal sebagai manifestasi dari konsep manusia sebagai mahluk religius. Toshihiko Isutzu. *Ethico Religious Concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill University Press. 1966: 3

permasalahan itu. Karena moralitas merupakan landasan ontologis kegiatan ekonomi maka setiap perilaku ekonomi harus berangkat dari landasan normatif ini yaitu perilaku yang benar akan mengarah pada hasil yang maksimal serta risiko dapat dihindari.

Dalam konteks ini, validitas metodologi ekonomi Islam dapat diujicoba berdasarkan konsistensi sistem internalnya serta kesesuaian dengan berbagai sistem yang mengatur dimensi kehidupan manusia. Dengan mempertahankan ekonomi Islam sebagai ilmu normatif maka perpaduan antara rasionalitas dan religiusitas ekonomi akan berjalan sebagaimana mestinya untuk mengembangkan mazhab ekonomi yang lebih mengakar di masa yang akan datang.[]

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mushtaq. 1999. *Business Ethics in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan
- Bakar, Osman. 1991. *Tawhid and Science*. Kualalumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science/Nurin Entrepriase
- Choudhury, Masudul Alam. 1998. *Studies in Islamic Social Sciences*. New York, London: St. Martin's Press, Inc-MacMillan Press, Ltd
- Dua, Mikhael. 2008. *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Jakarta: Gramedia
- Isutzu, Toshihiko. 1966. *Ethico Religious Concepts in the Quran*. Montreal: McGill University Press
- Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor. 2007. *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley&Sons (Asia), Pte.Ltd
- Kahf, Monzer. 1979. *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield In: Muslim Studies Association.
- Lakatos, Imre and Alan Musgrave (ed.). 1989. *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press
- Metwally, H.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. terj. Husein Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insana
- Rahman, Fazlur. 1981. *Quranic Sciences*. London: The Muslim Schools Trust
- _____. 1996. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. Anas Muhyidin. Bandung: Pustaka

Data Website:

- Mohammed Aslam Haneef "Can There Be an Economics Based on Religion? The Case of Islamic Economics" dalam *post-autistic economics review*. Issue no.34, 30 Octobre 2005, article 3, pp 41-52.
<http://www.peacon.net/PAEReview/issue34/Gammet34.htm>
- Charles K. Wilber "Ethics in Economics Theory" dalam *post-autistic economics review*. Issue no. 20, 3 June 2003, article 1.
<http://www.peacon.net/PAEReview/issue20/Wilber20.htm>